**ABSTRAK**

Implementasi dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan India mengenai peluncuran satelit LAPAN A1 yang diakomodir oleh ISRO merupakan pelaksanaan prinsip kerjsama yang diatur dalam *Outer Space Treaty* 1967, *Liability Convention* 1972 juga *Registration Convention* 1975. Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* yang mengatur mengenai *Cooperation in The Field of Outer Space Research and Development.*

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu, aspek hukum peluncuran satelit dalam perspektif hukum internasional serta implementasi perjanjian antara Indonesia dan India mengenai peluncuran satelit LAPAN A1. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek hukum peluncuran satelit LAPAN A1 mengacu pada peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam *Outer Space Treaty 1967* juga bahwa implementasi perjanjian antara Indonesia dan India mengenai peluncuran satelit LAPAN A1 merupakan kelanjutan dari kerjasama Indonesia dan India yang dibuat pada tahun 1997 kemudian perjanjian tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2002 yang didalamnya juga mengatur tentang pengadaan dan pengeoperasian *Satellite Launch Vehicle Ground* disamping itu juga manajemen misi satelit.

***Kata kunci : Aspek hukum, peluncuran satelit, implementasi perjanjian antara Indonesia dan India.***

**ABSTRACT**

*The implementation of the cooperation agreement between Indonesia and India on LAPAN A1 satellite launch by ISRO is accommodated cooperating implementation of the principles set out in the Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972 and also Registration Convention 1975. The cooperation is implemented with the signing of a Memorandum of Understanding concerning the Cooperation in The Field of Outer Space Research and Development.*

*Issues raised in this paper, namely, the legal aspects of the launch of the satellite in the perspective of international law and the implementation of the agreement between Indonesia and India on LAPAN A1 satellite launch. The method used is normative, with specification of descriptive analytical research.*

*The results showed that the legal aspects of satellite launch LAPAN A1 refers to the legal regulations referred to in the Outer Space Treaty in 1967 also that the implementation of the agreement between Indonesia and India over the satellite launch LAPAN A1 is a continuation of the cooperation between Indonesia and India were created in 1997 after the agreement was continued back in 2002 that includes also regulates the procurement and operating satellite Launch Vehicle Ground additionally also satellite mission management.*

***Keywords : legal aspect, the satellite launch, the implementation of the agreement between Indonesia and India.***